

INTISARI

Tampilnya perempuan nelayan dalam ruang publik menuntut pengakuan, kesejahteraan, dan representasi politik di ruang publik menandakan adanya peran dan kegiatan yang didasari pada semangat kewargaan. Kasus yang terjadi di Desa Morodemak dan Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak terjadi karena keterbatasan UU. No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menjangkau perlindungan terhadap kelompok perempuan nelayan, keberadaannya sebagai fakta sosial gagal ditangkap pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Purworejo yang menganggap perempuan tak mampu benar-benar menjadi nelayan dan pemahaman bias gender nilai agama sehingga mencederai tiap-tiap dimensi kewargaannya baik status legal, keanggotaan, hak, dan partisipasinya. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang dipakai adalah bahwa gerakan politik kewargaan tumbuh sebagai refleksi ketidakadilan yang dirasakan, kemudian gerakan menuntut keadilan tertransformasikan dalam konflik *head to head* dengan kepala desa sebagai aktor antagonisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang nantinya menghasilkan penjelasan dan analisis tentang peran aktor, proses pemenuhan permasalahan masing-masing dimensi keewargaan, bentuk ketidakadilan yang dirasakan, kronologi konflik dan strategi yang digunakan dalam merespon konflik tersebut.

Kata kunci: Kewargaan, bias gender, pengakuan, kesejahteraan, representasi politik.

ABSTRACT

The appearance of fishing women in the public sphere demands recognition, welfare, and political representation in the public space indicating the existence of roles and activities based on the spirit of citizenship. Cases that occurred in Morodemak and Purworejo Villages, Bonang Sub-District, Demak Regency occurred due to the limitations of the law. No. 7 of 2016 concerning Fisherman Protection, Fish Cultivators and Salt Farmers in reaching protection for fishing women groups, their existence as a social fact failed to be captured by the government in this case the Purworejo Village Government which considers women unable to truly become fishermen, and understanding gender bias towards religious values thus injuring each dimension of citizenship in terms of legal status, membership, rights and participation. In this study, the framework used is that the citizenship political movement grows as a reflection of perceived injustice, then the movement demands justice to be transformed in a head to head conflict with the Head of Purworejo Village as its antagonistic actor. This study uses qualitative research methods with a case study approach that will later produce explanations and analysis of the role of actors, the process of fulfilling the problems of each dimension of citizenship, the form of perceived injustice, conflict chronology and strategies used in responding to the conflict.

Keywords: Citizenship, gender bias, recognition, welfare, political representation.